

MATRIKS PENYUSUNAN KERJA ASISTEN DEPUTI PEMENUHAN HAK, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN 2023

				<table border="1"> <tr> <td><b>KP-4</b> Peningkatan Penciptaan Start-Up dan Peluang Usaha</td> <td><b>PRP-01</b> Pelatihan Kewirausahaan</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>PRP-02</b> Inkubasi Usaha</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>PRP-03</b> Penguatan Kapasitas layanan Usaha</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>PRP-04</b> Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah</td> </tr> <tr> <td><b>KP-5</b> Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial</td> <td><b>PRP-01</b> Pendampingan Akses Permodalan bagi Wirausaha Sosial berbasis ekonomi Kreatif</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>PRP-02</b> Pembinaan Wirausaha Sosial</td> </tr> </table>	<b>KP-4</b> Peningkatan Penciptaan Start-Up dan Peluang Usaha	<b>PRP-01</b> Pelatihan Kewirausahaan		<b>PRP-02</b> Inkubasi Usaha		<b>PRP-03</b> Penguatan Kapasitas layanan Usaha		<b>PRP-04</b> Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah	<b>KP-5</b> Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	<b>PRP-01</b> Pendampingan Akses Permodalan bagi Wirausaha Sosial berbasis ekonomi Kreatif		<b>PRP-02</b> Pembinaan Wirausaha Sosial					
<b>KP-4</b> Peningkatan Penciptaan Start-Up dan Peluang Usaha	<b>PRP-01</b> Pelatihan Kewirausahaan																				
	<b>PRP-02</b> Inkubasi Usaha																				
	<b>PRP-03</b> Penguatan Kapasitas layanan Usaha																				
	<b>PRP-04</b> Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah																				
<b>KP-5</b> Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	<b>PRP-01</b> Pendampingan Akses Permodalan bagi Wirausaha Sosial berbasis ekonomi Kreatif																				
	<b>PRP-02</b> Pembinaan Wirausaha Sosial																				
		<p>RAK Perlindungan Perempuan</p> <p>2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan implementasi UU PKDRT: Pembahasan RAN PKDRT</li> <li>2. Penyelesaian pembahasan regulasi turunan UU 18 Tahun 2017 tentang PPMI;</li> <li>RPP Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;</li> </ol>	<table border="1"> <tr> <td><b>PN-3</b></td> <td><b>PP-5</b></td> <td><b>KP-2</b></td> <td><b>PrP-02</b></td> </tr> <tr> <td>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</td> <td>Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda</td> <td>Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan</td> <td> <p>Perlindungan perempuan termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPD dengan memfokuskan program dan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dan strategi terkait Kekerasan terhadap Perempuan.</li> <li>2. Perlindungan PMI Bermasalah khususnya kelompok rentan</li> </ol> </td> </tr> </table>	<b>PN-3</b>	<b>PP-5</b>	<b>KP-2</b>	<b>PrP-02</b>	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan	<p>Perlindungan perempuan termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPD dengan memfokuskan program dan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dan strategi terkait Kekerasan terhadap Perempuan.</li> <li>2. Perlindungan PMI Bermasalah khususnya kelompok rentan</li> </ol>		<p>Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan)</p>	600.000.000	Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan						
<b>PN-3</b>	<b>PP-5</b>	<b>KP-2</b>	<b>PrP-02</b>																		
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan	<p>Perlindungan perempuan termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPD dengan memfokuskan program dan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dan strategi terkait Kekerasan terhadap Perempuan.</li> <li>2. Perlindungan PMI Bermasalah khususnya kelompok rentan</li> </ol>																		

		<p>RPP Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran</p> <p>3. Mengawal RUU TPKS masuk dalam Prolegnas 2022 dan penyelesaian pembahasan dengan DPR</p> <p>2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan RAN/Stranas PKDRT (lanjutan)</li> <li>2. Koordinasi Penanganan Kepulangan PMIB dari Malaysia</li> <li>3. Pelindungan PMI</li> </ol>	PN-7	PP-2	KP-1	PrP-02	<p>1</p> <p>Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Luar Pelindungan WNI/BHI</p> <p>Belum optimalnya penegakan hukum</p>	
			Memperkuat Stabilitas Poluhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, multilateral		
	<p>Rumusan Alternatif Kegiatan Inisiatif Baru</p>	<p>RAK Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Perempuan termasuk PMI Purna</p>	PN-3	PP-05	KP-02	PRP-01	17	<p>Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan</p>
			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan	Penguatan Kualitas Kelembagaan PUG	Meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan	
		<p>RAK Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Perempuan termasuk PMI Purna</p>	PN-1	PP-05	KP-01	PRP-01	18	<p>Memfasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi wirausahawan.</p>
			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro	Pengembangan kapasitas Usaha dan Kualitas Produk		
		<p>RAK Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Perempuan termasuk PMI Purna</p>			KP-02	PRP-01	<p>Memfasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi wirausahawan.</p>	
					Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	Dukungan Pemberian Modal Awal Usaha		
		<p>RAK Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Perempuan termasuk PMI Purna</p>				PRP-02	<p>Memfasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi wirausahawan.</p>	
						Pendampingan UMKM untuk mengakses kredit		
		<p>RAK Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Perempuan termasuk PMI Purna</p>				PRP-03	<p>Memfasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi wirausahawan.</p>	
						Pengembangan Skema Pembiayaan bagi Wirausaha dan UMKM		
		<p>RAK Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Perempuan termasuk PMI Purna</p>			KP-04	PRP-01	<p>Memfasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi wirausahawan.</p>	
					Peningkatan Penciptaan Start-Up dan Peluang Usaha	Pelatihan Kewirausahaan		
		<p>RAK Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Perempuan termasuk PMI Purna</p>				PRP-02	<p>Memfasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi wirausahawan.</p>	
						Inkubasi Usaha		
		<p>RAK Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Perempuan termasuk PMI Purna</p>				PRP-03	<p>Memfasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi wirausahawan.</p>	
						Penguatan Kapasitas layanan Usaha		
		<p>RAK Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Perempuan termasuk PMI Purna</p>				PRP-04	<p>Memfasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi wirausahawan.</p>	
						Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah		
		<p>RAK Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Perempuan termasuk PMI Purna</p>			KP-5	PRP-01	<p>Memfasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi wirausahawan.</p>	
					Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	Pendampingan Akses Permodalan bagi Wirausaha Sosial berbasis ekonomi Kreatif		
		<p>RAK Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Perempuan termasuk PMI Purna</p>				PRP-02	<p>Memfasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi wirausahawan.</p>	
						Pembinaan Wirausaha Sosial		
		<p>RAK Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Perempuan termasuk PMI Purna</p>		PN-7	PP-1	KP-01	PRP-02	<p>Memfasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi wirausahawan.</p>
				Memperkuat Stabilitas Poluhankam dan Transformasi	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Penguatan Peraturan Perundangan Bidang Politik	
		<p>RAK Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Perempuan termasuk PMI Purna</p>			KP-02	PRP-01	<p>Memfasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi wirausahawan.</p>	

			Pelayanan Publik		Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih					
		RAK Koordinasi	<b>PN-03</b>	<b>PP-05</b>	<b>KP-02</b>	<b>PrP-02</b>				300.000.000	
		Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan serta Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan	Perlindungan perempuan termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO			Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan)		Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
			<b>PN-7</b>	<b>PP-2</b>	<b>KP-1</b>	<b>PrP-02</b>			1	Optimalisasi perlindungan WNI	
		Memperkuat Stabilitas Poluhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, multilateral				Belum optimalnya penegakan hukum		
			<b>PP-5</b>	<b>KP-4</b>	<b>PrP-03</b>						
			Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penanganan Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya						
		RAK Koordinasi	<b>PN-03</b>	<b>PP-05</b>	<b>KP-02</b>	<b>PrP-02</b>				300.000.000	
		Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan	Perlindungan perempuan termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO			Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan)		Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
			<b>PN-7</b>	<b>PP-2</b>	<b>KP-1</b>	<b>PrP-02</b>			1	Optimalisasi perlindungan WNI/BHI	
		Memperkuat Stabilitas Poluhukam dan Transformasi	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, multilateral				Belum optimalnya penegakan hukum		
			<b>PP-5</b>	<b>KP-4</b>	<b>PrP-03</b>						
			Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penanganan Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya						
<b>TOTAL</b>										<b>1.930.000.000</b>	

Jakarta, 25 Maret 2022

Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan



Roos Diana Iskandar